

MODAL SOSIAL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA BATAM DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019

Rahma Putri Khasanah¹

¹Program Studi Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada,
Indonesia
rahmaputrikhasanah@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini akan membahas mengenai strategi Partai Keadilan Sejahtera di Kota Batam dalam mendapatkan legitimasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif. Strategi Politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan. Kemenangan yang diraih bukan sekedar berasal dari eksistensi partainya melainkan juga kemampuan personal seorang aktor politik yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mendukungnya, khususnya pada Dapilnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dengan anggota DPRD 2019-2024 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Kota Batam Muhammad Syafei, menggunakan teori Modal Sosial oleh Bourdieu (1986) yang mengkaji tiga indikatornya yaitu norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial Partai Keadilan Sejahtera mengikuti kearifan lokal daerah, jaringan sosial berkaitan dengan Timses dan pola rekrutmen partai serta legitimasi diperoleh dengan faktor dominan yaitu investasi sosial dan investasi materi.

Kata kunci: Modal Sosial, Partai Keadilan Sejahtera, Pemilu Legislatif, Legitimasi, Strategi Politik.

ABSTRACT

This study will discuss the strategy of the Prosperous Justice Party in Batam City in gaining community legitimacy in the Legislative Election. Political strategy is a set of methods in order to win the battle between various political forces that want power. The victory achieved not only comes from the existence of his party but also the personal ability of a political actor who can influence the public to support him, especially in his electoral district. This study uses a qualitative descriptive method with interviews with members of the 2019-2024 DPRD for the Prosperous Justice Party Faction in Batam City, Muhammad Syafei, using the Social Capital theory by Bourdieu (1986) which examines three indicators, namely social norms, social networks and trust. The results showed that the social norms of the Prosperous Justice Party followed local local wisdom, social networks related to Timses and party recruitment patterns and legitimacy was obtained by dominant factors, namely social investment and material investment.

Keywords: Social Capital, Prosperous Justice Party, Legislative Elections, Legitimacy, Political Strategy.

PENDAHULUAN

Secara umum, kemampuan partai dalam mengelola organisasi sesuai dengan perubahan dan kebutuhan lingkungan, merupakan salah satu faktor yang memungkinkan sebuah partai bertahan di panggung politik dan mempertahankan eksistensinya. PKS identik sebagai partai ideologis dengan ideologi Islamnya, dengan sejarah berdirinya PKS dimulai dari organisasi dakwah, kemudian menjadi Partai Keadilan (PK), hingga akhirnya resmi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan mengangkat isu-isu politik yang lebih cair. Menurut Katz dan Mair dalam pengorganisasian partai terdapat konsep tiga wajah partai yaitu wajah partai pusat, wajah partai di jabatan publik dan wajah partai di akar rumput. Wajah partai di akar

rumpun dimana partai berinteraksi langsung dengan pemilih dan berkaitan dengan kemampuan partai menarik massa pendukung dan pemilih yang mengakar di masyarakat (Mentari, 2018).

Partai politik memiliki pilihan untuk mengambil langkah strategis guna mempertahankan keberlangsungan organisasinya di arena politik, dimana tempat pertarungan aktor untuk mendapatkan legitimasi ataupun posisi strategis di pemerintahan yang di dalamnya terdapat modal sebagai penunjang tujuan (Plaituka et al., 2018). Seorang calon legislatif membutuhkan modal dan strategi dalam merebut suara masyarakat pada daerah pemilihannya. Daerah pemilihan dalam hal ini merupakan ranah bagi calon legislatif yang memiliki peluang besar dalam ikatan sosial untuk menarik hati masyarakat agar mendukung calon legislatif untuk memenangkan pemilihan (Plaituka et al., 2018). Adanya strategi merupakan kunci kemenangan seorang calon atau kandidat dan merupakan peranan penting dalam kemenangan tersebut. Keberhasilan untuk memenangkan pemilihan umum legislatif tidak bisa lepas dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga upaya melakukan persuasi terhadap masyarakat pemilih harus terus dilakukan, yang pada akhirnya memberikan dukungan suaranya untuk memilihnya (Lubis, 2017).

Strategi Politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan dengan modal yang dimiliki partai dan calon legislator. Maka diperlukannya modal sosial dalam menjalin hubungan baik antara caleg dan pemilih, yang akan memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Modal sosial terbentuk dari kepercayaan tiap individu dalam jaringan sosial sehingga komitmen yang sudah ada, dapat dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, modal sosial pada dasarnya adalah jalinan yang menghubungkan antara individu dan kelompok masyarakat, yang memberi dampak positif bagi masing-masing pihak. Jalinan yang menghubungkan antara individu dan masyarakat bukanlah suatu yang muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil interaksi secara individual maupun kolektif yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar, sehingga menghasilkan relasi yang bersifat jangka panjang (Santoso, 2020).

Modal sosial yang digunakan untuk tujuan bersama-sama dari kelompok suatu organisasi untuk mendapatkan suara bagi tiap-tiap aktor untuk membentuk brand image dari anggota legislatif ketika dipilih (Ananda & Valentina, 2021). Hal ini menjadi tantangan bagi

seorang Calon Legislatif untuk merebut suara rakyat. Kemenangan yang diraih semata-mata bukan sekedar karena mendompleng dari eksistensi partainya atau organisasi sosial, melainkan juga kemampuan personal seorang aktor politik yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mendukungnya, khususnya pada daerah pemilihannya. Dalam melakukan pemetaan Daerah Pemilihan (Dapil) mengacu pada Keputusan KPU No.273 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, bahwa Dapil untuk Kota Batam pada Pemilu Legislatif terbagi menjadi 6 Daerah Pemilihan dengan 50 anggota dewan terpilih. Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan ranah dimana terbangunnya ikatan emosional maupun sosial dari aktor untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat sebagai pemilih (Plaituka et al., 2018)

Tabel 1. Daftar Anggota DPRD Kota Batam Periode 2019-2024 Fraksi PKS

No.	Nama Anggota	Daerah Pemilihan	Suara Sah
1.	Rohaizat, S.T	Kota Batam 1	2.956
2.	Siti Nurlailah, S.T., M.T	Kota Batam 2	1.120
3.	Mochamat Mustofa	Kota Batam 3	3.624
4.	Muhammad Syafei, A.md	Kota Batam 4	2.638
5.	Drs. Zainal Arifin	Kota Batam 6	1.639

Sumber: Diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 anggota DPRD Kota Batam yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera yang berhasil mendapat dukungan masyarakat pada Pileg 2019. Dalam upaya meraih dukungan ini, semua partai politik termasuk PKS melakukan pola-pola dengan rencana untuk mencapai tujuan tersebut dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang atau akan dilaksanakan suatu organisasi (Supriono, 1998) dalam (Fitriyah & Tinov, 2013). Hal ini berkaitan dengan modal sosial partai, yang berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal dan percaya bahwa relasi sosial adalah sumber daya yang berharga (Bhandari dan Yasinoubu, 2009) dalam (Akbar & Al-hamdi, 2020).

Menurut Bourdieu, (1986) dalam (Dollu, 2019) modal sosial atau *social capital* merupakan sumber daya yang terdapat pada individu maupun kelompok masyarakat yang terhubung dalam sebuah jaringan (*network*), yang terkait dalam relasi yang bersifat institusional maupun non-institusional, dan saling menguntungkan satu sama lain. Ketiga indikator dari teori modal sosial dari Bourdieu (1986), yaitu norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan merupakan indikator atau unsur modal sosial. Ketiganya merupakan hubungan

saling berkaitan yang menarik untuk dibahas. Penelitian ini berfokus pada strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di tahun 2019 yang dikerangkai dengan Teori Modal Sosial, bertujuan untuk mengetahui bagaimana strateginya mempertahankan eksistensi partai dan meraih kursi di legislative, sehingga dapat menjadi acuan untuk persiapan Pileg 2024. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana modal sosial Partai Keadilan Sejahtera Kota Batam dalam merebut suara rakyat Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019?

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif karena bermaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis terkait strategi politik dari Partai Keadilan Sejahtera dalam mempertahankan eksistensinya untuk meraih kursi di legislative dengan teori Modal Sosial Bourdieu (1986). Metode pengambilan data dengan menggunakan Teknik wawancara bersama narasumber serta dokumentasi sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang sudah peneliti tentukan.

PEMBAHASAN

Partai Keadilan Sejahtera dalam Perspektif Norma Sosial pada Kondisi Masyarakat Kota Batam

Norma sosial dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau panduan hidup yang biasanya tidak tertulis dan berlaku di masyarakat dan dapat mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial masyarakat (Zulfi, 2021). Norma sendiri pun memiliki sifat mengikat dan wajib ditaati, sebagai pedoman kehidupan sosial oleh masyarakat yang tinggal di dalam satu wilayah. Norma juga berkaitan dengan kondisi dan nilai-nilai masyarakat dalam wilayah tertentu, seperti halnya adat dan istiadat masyarakat Kota Batam yang mengadopsi adat istiadat budaya melayu. Terdapat penduduk yang dominan yaitu suku melayu, Jawa, Batak, Minangkabau dan Tionghoa.

Mayoritas masyarakat Kota Batam berasal dari pendatang daerah lain dan berdasarkan data kependudukan tahun 2020, Islam merupakan agama mayoritas di Kota Batam, dengan jumlah penganut sebanyak 71,96%. Seperti yang disampaikan dalam wawancara bersama anggota DPRD Muhammad Syafei:

“Kalau di Batam ini kita kan mayoritas pendatang, dari mana-mana datang ke Batam, dari suku Padang, Palembang, Jawa, Batak ada di Batam. Bahkan mayoritas anggota DPRD ini dari pendatang, sedikit yang lahir dan besar di Batam hanya 3-4 orang aja selebihnya pendatang. Kalau secara agama, mayoritas Islam 70% dan 30% nya nonmuslim campur ada Kristen, Hindu dan Konghucu.”

Dalam pemberitaan media dan penelitian terdahulu, beberapa menyatakan bahwa PKS ini merupakan partai yang tertutup dengan kendalanya yaitu kesulitan untuk memperluas basis massa, seperti yang disebutkan (Mentari, 2018) bahwa PKS dalam pengelolaannya mengalami kesulitan dalam memperluas basis massanya yang mengakibatkan perolehan suara yang cenderung stagnan. Statement tersebut akhirnya diluruskan oleh Anggota DPRD Fraksi PKS di Batam, Bapak Syafei dalam wawancara bersama penulis pada tanggal 4 November 2021:

“Jadi saya luruskan dulu, itukan pendapat seseorang ya, pendapat media yang mengatakan demikian, sementara PKS itu adalah partai terbuka. Memang dulu awalnya berlandaskan Islam ya partai dakwah, jadi kita ubah sedikit visi misinya menjadi partai Islam yang rahmatan lil alamin, yang terdepan dan kokoh melayani masyarakat jadi gak lagi partai dakwah, kadang kalau masyarakat mendengar kata dakwah kadang alergi ya, atau ada pemahaman yang sedikit eksklusif atau tertutup bagi kalangan agama tertentu saja. Makanya diubah menjadi partai Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberikan manfaat bagi seluruh alam.”

Diketahui salah satu strategi partai untuk memperluas basis massanya dengan mengubah visi-misi yang dulunya eksklusif sebagai partai dakwah, berubah menjadi lebih pragmatis dengan pendekatan mengikuti kondisi masyarakat atau kearifan lokal daerah. Hal ini berkaitan dengan bagaimana norma sosial yang ada dalam masyarakat, dapat mempengaruhi arah partai menjadi lebih pragmatis menyesuaikan dengan nilai-nilai di masyarakat. PKS yang dahulunya dikatakan Partai dengan Ideologi Islamnya yang kuat, tetapi dengan visi-misinya yang baru yaitu “partai Islam yang rahmatan lil alamin, yang terdepan dan kokoh melayani masyarakat” mampu untuk merepresentasikan daerah yang minoritas muslim. Seperti yang disampaikan Bapak Syafei dalam wawancara:

“Ya, jadi PKS lebih mengikuti kearifan lokal suatu daerah. Nah dari visi-misi yang saya sebutkan, berarti targetnya kepada seluruh manusia, gak hanya Islam saja tetapi seluruh umat manusia dan terdepan dalam melayani masyarakat, karena PKS terbuka. Bahkan di daerah yang minoritas seperti di Papua, ada juga dewan dari nonmuslim. Memang kalau di daerah mayoritas kita tentunya mengedepankan kader atau caleg yang muslim tetapi ketika di daerah yang

minoritas kita pun tidak memaksakan, dari yang minoritas bisa kita angkat menjadi caleg yang ada di daerah tersebut, seperti papua dan seterusnya.

Jaringan Sosial Partai Keadilan Sejahtera

Jaringan sosial dapat dikatakan sebagai bagian daripada sebuah pola hubungan sosial antara individu maupun kelompok dalam berbagai bentuk yang sifatnya kolektif. jaringan sosial Partai Keadilan Sejahtera juga berkaitan dengan pola rekrutmen partai yang selektif, dengan menggunakan dua strategi yaitu rekrutmen individual dan rekrutmen institusional (Nuraeni & Djuhana, 2019). Pertama, pola rekrutmen individual dengan pendekatan perorangan dan melakukan komunikasi secara personal untuk mengajak orang aktif berpartisipasi dalam forum dan kegiatan dari PKS. Kedua, secara institusional dimana PKS bekerja sama dengan organisasi formal maupun nonformal untuk menyeleksi kader yang potensial untuk internal partainya, seperti dalam kegiatan dan acara-acara seperti majelis ta'lim dan kegiatan keagamaan lainnya. PKS juga membuka rekrutmen untuk semua generasi dan gender melalui Website PKS. Disampaikan juga oleh Bapak Syafei dalam wawancara bersama penulis:

“Jadi kita sebagai partai terbuka, membuka seluas-luasnya dari sisi gender laki-laki, perempuan, bapak ibu silahkan termasuk generasi-generasi pemuda tadi ya. Kita kan ada beberapa generasi, generasi Z itu generasi yang kita di umur 12-23 tahun kemudian generasi milenial dari umur 24-39 tahun, kemudian generasi X generasi umur 40-59 dan generasi terakhir dari umur 60-70an semua menjadi bagian daripada bidik sasaran dari PKS. Ada rekrutmen baik melalui acara-acara, kegiatan-kegiatan ataupun di media sosial, jadi dibuka open rekrutmen ada websitenya ada linknya untuk bisa mendaftar ke link pendaftarannya untuk menjadi anggota PKS.”

Jaringan sosial juga sangat diperlukan dalam upaya mendapatkan dukungan dari masyarakat, sebagai salah satu modal untuk meraih kemenangan dalam Pileg. Partai dalam hal ini sebagai kendaraan yang mengantarkan kadernya untuk berada di posisi strategis dalam pemerintahan, tentunya seorang Calon Legislatif yang berasal dari partai, harus mampu mengikuti visi-misi dan aturan partai sebagai kader yang baik. Seperti halnya, Bapak Muhammad Syafei seorang DPRD Kota Batam tahun 2019-2024 dalam pemilihan pertamanya dan menang di dapilnya, sudah menjadi kader PKS bahkan ketika masih bernama Partai Keadilan (PK) selama sekitar 20 tahunan dan beliau aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sejak kuliah. Seperti yang beliau sampaikan dalam wawancara bersama penulis:

Saya jadi kader PKS ini semenjak kuliah tahun 97, jadi ketika partai pun belum berdiri, saya termasuk orang yang aktif di kegiatan di kampus saya dulu pengurus sema, senat mahasiswa politeknik Unsri kalau sekarang namanya BEM, saya pengurus mahasiswa di bagian rohis kerohanian islam di bidang agama, termasuk aktif di mushola kampus karna background atau latar belakang partai ini yang dideklarasikan tahun 1998 Partai Keadilan adalah para mahasiswa-mahasiswa di kampus ataupun di tingkat slta dan di masyarakat yang aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Ketika partai didirikan partai keadilan itulah basisnya dari aktivis-aktivis kampus, sekolah-sekolah dan juga masyarakat, sosial kemasyarakatan. Jadi kenapa berdiri dan diganti PKS karena menurut UU Pemilu tahun 1998 partai yang tidak mencapai ET (Electoral Threshold) sebanyak 2%, Partai Keadilan tidak mencapai ET, maka diganti namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera jika ingin ikut pemilu, orang-orangnya tetap hanya namanya saja yang diganti.”

Sebelumnya Beliau bekerja di salah satu Perusahaan Swasta Elektronik di Batam dan menjadi Calon Legislatif di tahun 2019 setelah diusung oleh PKS dan berhasil menjadi anggota DPRD tahun 2019-2024. Seperti dalam wawancara:

“Jadi masing-masing partai itu berbeda-beda mekanismenya, tergantung platform atau ADRT partainya kalau di PKS calegnya termasuk saya diusung oleh pengurus partai, baik pengurus partai sendiri, tokoh agama atau tokoh masyarakat diusungkan, yang memiliki simpul-simpul massa yang aktif di masyarakat. Cuma saya baru anggota dewan tahun 2019-2024 karena baru dicalonkan kemarin tahun 2019.”

Pendanaan Partai khususnya pada saat kampanye berasal dari Kas Partai dan dana pribadinya. Ketika seorang Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil menduduki kursi dewan di Provinsi dan Kabupaten/Kota maka harus memberikan potongan partai perbulan sesuai dengan tingkat jabatannya, seperti yang disampaikan dalam wawancara:

“Kalau partai PKS juga mungkin partai lain bagi kadernya atau yang sudah menjadi anggota dprd kota, kabupaten, provinsi bahkan sampai kepala daerah ada itu namanya potongan partai perbulan, nah itu besarnya tergantung partai masing-masing untuk diserahkan kepada tingkat DPP maupun daerah, misalkan dewan provinsi berarti diserahkan ke tingkat DPW itu untuk keberlangsungan organisasi partainya, untuk operasional dan seterusnya. Kedua tentunya dari dana kita sendiri untuk bisa secara luas, masif mendatangi masyarakat, silaturahmi, membantu advokasi masyarakat.”

Jaringan sosial erat juga kaitannya dengan adanya Tim Sukses yang solid yang membantu kandidat untuk memperoleh suara lebih banyak lagi. Tim sukses dapat dibentuk oleh partai dan terbentuk secara mandiri yang ditentukan oleh sang calon sendiri (Tawakkal

et al., 2020). Keberadaan Timses mandiri ini dibutuhkan bukan hanya bagi kandidat, namun juga bagi pemilihnya sebagai perantara. Biasanya Timses mandiri ini terbentuk secara inisiatif karena sudah memiliki hubungan kerabat atau hubungan dekat dengan kandidat. Berkaitan dengan strategi Timses oleh Bapak Syafei berasal dari ranah tempat kerja sebelumnya, yaitu rekan-rekan kerjanya dari PT. SIIX Batam, seperti yang disampaikan rekan kerja beliau Bapak Hadimun dalam wawancara bersama penulis tanggal 7 November 2021:

“Bisa dikatakan Timses ya, di perusahaan sebelumnya, jadi teman-teman di PT yang punya jabatanlah seperti supervisor produksi sama manager. Karena tau Pak Fei mencalonkan diri menjadi caleg PKS jadi supervisor ini mengumpulkan anak buahnya seperti operator, teknisi terutama yang ada di Dapil beliau wilayah Sagulung untuk diumumkan kalau Pak Fei mencalonkan diri, jadi kalau ada kawan-kawan yang tinggal di sagulung dan punya hak suara tolong dibantu lah kawan kita sendiri satu PT begitu. Termasuk juga orang-orang yang nonmuslim, ya karena ada hubungan kerja itu tadi makanya dia juga banyak dapat suara bukan cuman dari muslim aja. Jadi gak terkotak pendukungnya cuman muslim aja, tapi nonmuslim juga. Akhirnya di dapilnya beliau juga dapat suara banyak.”

Kepercayaan Masyarakat terhadap Partai Keadilan Sejahtera dan Kandidatnya

Kepercayaan masyarakat dalam Partai Politik juga berkaitan dengan legitimasi dimana perlunya penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap seorang Caleg yang nantinya akan memiliki otoritas dalam daerahnya. Seturut dengan penjelasan (Haryanto, 2017) bahwa legitimasi merupakan kepercayaan yang menunjukkan mengapa the rules (penguasa) dapat dipatuhi kepemimpinannya. Seorang caleg harus berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat, sebaliknya masyarakat juga melihat kharisma dan keputusan yang diambil serta bantuan-bantuan yang diberikan, sehingga dapat dilegitimasi oleh masyarakat. Menurut Bapak Syafei dalam wawancara bersama penulis tanggal 4 November 2021, beliau menyebutkan terdapat dua faktor dominan untuk memperoleh kepercayaan atau legitimasi dari masyarakat yaitu investasi sosial dan investasi materi, selain itu pentingnya struktur soliditas partai, Timses, dan keaktifan di sosial media, narasumber menyatakan:

“Jadi ada dua faktor dominan untuk meraih kepercayaan masyarakat dan kita bisa sukses di caleg untuk menjadi anggota dewan atau anggota legislatif, yang pertama itu adalah investasi sosial dimana kita punya kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat untuk masyarakat atau berjiwa sosial membangun tempat daerah tempat tinggal sekitarnya, terutama dapilnya baik melalui

advokasi ataupun bantuan-bantuan kepada masyarakat itu namanya investasi sosial. Yang kedua investasi materi kita punya harta lebih, dengan harta lebih itu kita banyak membantu masyarakat bantuan langsung maupun tidak langsung artinya yang membutuhkan secara materi maupun kita memfasilitasi misalkan untuk membangun infrastruktur di daerah tersebut. Jadi itu investasi sosial dan investasi materi dan ditambah lagi dengan struktur soliditas dari partai itu sendiri di tingkat pusat DPP, di tingkat provinsi DPW di tingkat kota dan kabupaten DPD, di tingkat kecamatan DPC, di tingkat kelurahan DPRA, sampai di tingkat-tingkat perumahan atau rw harus solid partainya. Termasuk kemudian Timses sendiri dari caleg tersebut. Kemudian aktif di media sosial agar kita bisa mengimbangi lajunya ilmu teknologi disaat sekarang ini, jaman terbuka jaman dimana orang aktif di media sosial agar lebih dikenal oleh masyarakat secara luas terutama di daerah pemilihannya.”

Ketika caleg mampu mencitrakan diri sesuai dengan visi-misi partai di masyarakat, merupakan sebuah daya tarik untuk memperoleh legitimasi yang kuat, terutama ketika Caleg PKS mampu mencitrakan dirinya sesuai dengan *image* PKS dan mampu mendekatkan dirinya dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Seperti yang disebut Bapak Hadimun selaku masyarakat yang juga mengenal Bapak Syafei di lingkungannya:

“Saya lihat pak Fei memang orang PKS, artinya begini chemistrynya dia dengan arahnya PKS itu matching. Kemudian dia memang orangnya punya jiwa sosial yang tinggi, di PT beliau jadi ketua ta’lim terus kalau ada karyawan yang meninggal dia selalu pertama minta izin untuk takziah, kemudian dia juga rutin ikut kegiatan donor darah, dia juga di rumahnya terpilih jadi ketua RW dua periode. Di dapilnya dia juga melakukan semenisasi dengan perbaikan masjid dan jalan sekitar masjid juga pemberian bantuan. “

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan, termasuk juga PKS. Dengan kata lain, partai politik yang tidak berkuasa khususnya dalam pemerintahan bertindak sebagai oposisi dalam rangka untuk membuat check and balances terhadap kekuatan pemerintah, seperti yang disampaikan narasumber Bapak Syafei:

“Jadi ini bermula pada saat Pilpres tahun 2019 kan, pada saat itu ada dua kubu 01 dan 02 ada kubu Jokowi-Ma’ruf Amin dan 02 Prabowo-Sandi Uno nah kita PKS, Gerindra, Demokrat dalam barisan itukan walaupun hasilnya dimenangkan 01, PKS konsisten dengan pilihan ketika pilpres itu untuk menjadi oposisi walaupun Gerindra sudah bergabung dalam koalisi pemerintahan, ya itu tadi untuk check and balances karena kitakan demokrasi, demokrasi artinya semua tidak harus sama, kalau benar kita dukung dan kalau salah kita kritis untuk membangun. Jadi bukan cuma kritik tapi tidak membangun tidak ada solusi. Namun kritis yang membangun dan

konstruktif jadi itu yang PKS lakukan. Ketika menyinggung kepentingan masyarakat terganggu atau ketidakadilan maka PKS akan menyuarakan aspirasi tersebut. Jadi bukan oposisi yang sembarangan ya, jadi oposisi yang ketika benar didukung ketika salah, tentu akan di kritik PKS demi kepentingan masyarakat luas.”

Dalam negara demokrasi fungsi partai politik dalam posisi sebagai oposisi sangat diperlukan, seperti yang dilakukan PKS untuk tetap konsisten menjadi oposisi pemerintahan untuk melakukan check and balances terhadap pemerintahan. Dengan pengambilan keputusan PKS pusat yang konsisten untuk tetap menjadi oposisi juga dapat memperkuat legitimasi masyarakat terhadap partai.

KESIMPULAN

Modal sosial dalam Pemilu Legislatif sangat diperlukan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat yang pada akhirnya dapat mengantarkan Calon Legislatif untuk menduduki jabatan di DPRD. Melihat salah satu kandidat PKS dengan strateginya mendapatkan dukungan berupa suara dari masyarakat dan menang di Pemilu Legislatif, penulis menggunakan teori Modal sosial dengan tiga indikatornya yaitu norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan, yang menghasilkan kesimpulan bahwa norma sosial berkaitan dengan bagaimana kondisi masyarakat di Kota Batam yang mayoritas pendatang dan beragama muslim, serta strategi PKS untuk mengikuti kearifan lokal daerah untuk memperluas basis massanya. Pada indikator jaringan sosial diperlukan pengetahuan akan jati diri Partai, memperkuat Tim Sukses Mandiri dan pola rekrutmen partai yang selektif berupa rekrutmen individual dan institusional. Indikator terakhir yaitu kepercayaan yang berkaitan dengan strategi memperoleh legitimasi yaitu dengan investasi sosial dan investasi materi selain itu juga pentingnya struktur soliditas internal partai dan keaktifan kandidat dalam media sosial untuk dapat dikenal dan melakukan pendekatan digital pada masyarakat. Penulis merasa dalam kajian ini masih terdapat keterbatasan dari segi teori dan pembahasannya, maka perlunya pengembangan terkait pendekatan dan teori untuk membahas bagaimana strategi partai dan caleg dalam menghadapi Pemilu Legislatif mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Al-hamdi, R. (2020). Modal Sosial Parabola Dalam Mendukung Kemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Pasca Orde Baru. *Jurnal Moderat*, 6(November), 666–682.
- Ananda, R., & Valentina, T. R. (2021). Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 169–185. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2496>
- Dollu, E. B. S. (2019). Modal Sosial: Studi Tentang Kumpo Kampo Sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur. *Warta Governare*, 1(1), 59–72.
- Fitriyah, A., & Tinov, M. Y. T. (2013). Strategi Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Pemilu Legislatif 2009. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 11(1), 25–29.
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan : Suatu Bahasan Pengantar*. <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/f/810/elit-massa-dan-kekuasaan-haryanto>
- Lubis, L. L. (2017). Strategi Zukri dalam Memperoleh Suara Pada Pemilihan Legislatif Provinsi Riau Tahun 2014. *Jom FISIP*, 4(1), 1–10. <https://gain.fas.usda.gov/RecentGAINPublications/AgriculturalBiotechnologyAnnualOttawaCanada11-20-2018.pdf> <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101869> <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.06.039> <http://www.oecd.org/gov/regulatory-poli>
- Mentari, D. S. (2018). *Harga Sebuah Pilihan : Strategi PKS dan Partai Demokrat Menata Raut Wajah*.
- Nuraeni, N., & Djuhana, A. (2019). Pola Rekrutmen dan Pembinaan Kader Partai Keadilan Sejahtera. *Varia Hukum*, 1(2), 155–166.
- Plaituka, I. R. R., Azhar, M. A., & Noak, P. A. (2018). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemenangan Calon Anggota Legislatif Pasca Pindah Dapil Pada Pemilu Legislatif Kota Surabaya Tahun 2014. *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1–11.
- Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial*.
- Tawakkal, I., Damayanti, R., Subekti, T., Garner, A., & Seitz, T. (2020). Jejaring Sosial dalam Pembentukan Tim Sukses Mandiri di Pemilu DPRD Kabupaten 2019. *Wacana Politik*, 5(1), 1–14.
- Zulfi, F. (2021, July 2). *Norma Sosial: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-jenisnya | Orami*. <https://www.orami.co.id/magazine/norma-sosial/>